

REPRESENTASI PERISTIWA DALAM MEDIA (PEMBERITAAN PERISTIWA BANJIR DALAM SUARA MERDEKA)

Nurhayati

Universitas Diponegoro, Semarang
noerhytwid@yahoo.com

Abstract

Studies concerning the use of a language in media have attracted many social scientists because the studies are considered multi-discipline studies covering linguistics, social sciences, and a communication science. This study discusses the way media practitioners manipulate a language to represent a flood phenomenon using a critical discourse analysis approach. The data are utterances in a hard news text taken from *Suara Merdeka*, February, 5, 2014. Using three steps of analysis, those are description, interpretation, and explanation, I come to the finding that in representing the phenomenon, the media practitioners conducted complex discourse practices. The lexicogrammar used implies the social practice happening to the society.

Kajian tentang bahasa dalam media telah menarik minat para peneliti di bidang ilmu sosial karena kajian ini memerlukan ilmu lintas disiplin yang mencakupi antara lain linguistik, ilmu sosial, dan ilmu komunikasi. Makalah ini membahas cara awak media memanipulasi bahasa dalam merepresentasikan sebuah peristiwa banjir dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis. Data yang berupa teks hard news diambil dari *Suara Merdeka* tanggal 5 Februari 2014 dianalisis dengan menggunakan tiga tahapan, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa berita yang tampaknya melaporkan peristiwa faktual tersebut ternyata merupakan hasil praksis wacana yang sangat kompleks. Penggunaan bahasa dalam pemberitaan tersebut mengimplikasikan praksis sosial yang terjadi di dalam masyarakat.

Key words: representation, ideology, discourse practice, social practice

PENDAHULUAN

Cara media merepresentasikan peristiwa sosial menjadi topik kajian yang banyak diminati akhir-akhir ini. Diilhami antara lain oleh van Leeuwen (1995), Fairclough (1995), dan Mills (1995), para peneliti ilmu sosial semakin mengakui

kekuatan bahasa sebagai alat untuk melakukan praksis wacana. Media merupakan sumber data yang kaya, sehingga setakat ini tidak terhitung tulisan tentang bagaimana media memanfaatkan bahasa untuk melakukan praksis wacana. Melalui ancangan analisis wacana kritis, penelitian dengan teks dalam media sebagai sumber data banyak dilakukan. Tujuan utama dari penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah menemukan ideologi yang mempengaruhi seorang reporter dalam menulis berita, menjelaskan bagaimana entitas sosial direpresentasikan dalam media, dan menemukan cara awak media mengonstruksi identitas partisipan dalam pemberitaan.

Melaporkan peristiwa dalam bentuk teks (verbal, audio-lingual, atau visual) dalam media merupakan suatu tindak atau praksis komunikatif yaitu tindak mencerap (*perceive*) suatu objek, mengonstruksi objek tersebut dalam minda (*mind*) dan dengan kemampuan bahasa yang dimiliki, pelapor tersebut memilih bentuk dan cara tertentu untuk mengungkapkan hasil konstruksi peristiwa tersebut. Dalam tindak komunikasi, tahapan-tahapan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh pengetahuan penutur atas 'dunia' yang ada di sekelilingnya. Dengan demikian, menggunakan bahasa untuk melaporkan peristiwa tidak semata-mata sebagai tindak komunikatif melainkan sebagai praksis sosial (*social practice*) yang memiliki dua implikasi (Fairclough 1995: 54). Pertama, menggunakan bahasa berarti melakukan suatu tindak bertutur (*speech act*) atau tindak berwacana (*discourse act*). Di dalamnya terkandung tiga tahapan dalam bertindak tutur, yaitu tindak menuturkan bahasa, tindak tertentu melalui bahasa, dan tindak menghasilkan efek tertentu (lihat Austin 1962 dan Levinson 1983). Implikasi yang kedua, menurut Fairclough (1995: 54), adalah bahwa dalam melakukan tindak tutur tersebut, seorang penutur dipengaruhi oleh faktor sosiokultural dan historis. Dari uraian di atas, seorang praktisi media akan dipengaruhi oleh konteks sosiokultural dan historis dalam melaporkan peristiwa. Selanjutnya, hasil praksis sosial yang dilakukannya tersebut berpotensi mempengaruhi struktur sosial bagi pembacanya.

Hubungan dialektik dalam penggunaan bahasa sebagai praksis sosial tersebut merupakan ranah kajian analisis wacana kritis, yang selanjutnya disingkat AWK, sebuah ancangan yang mengkombinasikan kajian tekstual dalam linguistik dan kajian sosial dan budaya dalam ilmu-ilmu sosial. Fairclough (1995: 53—54) berpendapat bahwa AWK merupakan suatu ancangan yang menawarkan suatu tahapan analisis yang memberi perhatian pada unsur-unsur tekstual dan selanjutnya menghubungkan hasil analisis tersebut dengan teori sosial untuk menemukan relasi antara makna tekstual dan makna sosial dalam sebuah teks.

Dari kaca mata AWK, media sebagai suatu institusi tentulah dipengaruhi oleh aspek-aspek tertentu dalam proses pemberitaannya. Pengaruh tersebut tercermin dalam cara awak media merepresentasikan sebuah peristiwa, bagaimana mereka membentuk identitas dari partisipan yang terkait di dalamnya, dan bagaimana mereka mengungkapkan relasi antara awak media dan para partisipan, awak media dan peristiwa yang dilaporkan, serta relasi antar-partisipan dalam pemberitaan. Informasi-informasi tersebut dapat dilacak melalui penggunaan bahasa yang dimanifestasikan dalam bentuk teks.

Berdasarkan fenomena tersebut, saya tertarik untuk mengkaji pemberitaan fenomena banjir di Jawa Tengah dalam harian *Suara Merdeka* dengan

menggunakan ancangan AWK. Aspek yang akan dikaji dengan ancangan AWK dalam artikel ini adalah ihwal cara awak media merepresentasikan peristiwa banjir tersebut. Seperti diketahui, banjir yang akhir-akhir ini melanda hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah menjadi topik pemberitaan yang menonjol di media regional selama sehari-hari. Sejumlah koran yang ada di Jawa Tengah memberitakan peristiwa banjir ini dalam berita utama mereka. Dalam melakukan pemberitaan, tentu saja tiap-tiap media memiliki sudut pandang yang berbeda. Masuknya sudut pandang dalam praksis wacana pemberitaan banjir tersebut dapat dilacak melalui penggunaan ungkapan kebahasaan yang dimanifestasikan dalam teks masing-masing. Dengan menggunakan ancangan AWK, penelitian ini akan menjawab masalah penelitian yang tersusun dalam beberapa pertanyaan penelitian berikut.

- (1) Peristiwa sosial seperti apa yang direpresentasikan oleh media *Suara Merdeka* dalam memberitakan peristiwa banjir tanggal 5 Februari 2014?
- (2) Bagaimana cara media *Suara Merdeka* merepresentasikan peristiwa sosial tersebut?
- (3) Faktor sosiokultural seperti apa yang mempengaruhi staf redaksi *Suara Merdeka* dalam merepresentasikan peristiwa sosial tersebut?

Jawaban atas ketiga pertanyaan di atas dapat digunakan untuk menjelaskan dimensi praksis sosiokultural (*sociocultural practice*) yang sedang berlangsung dan pengaruhnya dalam peristiwa komunikatif pemberitaan banjir. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut juga dapat ditemukan strategi yang ditempuh oleh media *Suara Merdeka* dalam mengkomunikasikan cara pandangnya.

METODOLOGI

Sesuai dengan permasalahan yang akan dijawab dan tujuan penelitian, data penelitian berupa teks pemberitaan tentang banjir di daerah Jawa Tengah yang terjadi pada tanggal 3 dan 4 Februari 2014. Oleh karena itu, teks pemberitaan yang dipilih adalah pemberitaan tanggal 5 Februari 2014. Dari hasil seleksi sejumlah teks yang ada, teks yang dijadikan sebagai korpus data adalah “Semarang Terendam Banjir” yang dimuat pada tanggal 5 Februari 2014.

Penelitian ini menggunakan ancangan AWK yang dikemukakan oleh Fairclough. Salah satu aspek yang ingin diteliti adalah cara awak media merepresentasikan peristiwa banjir. Berdasarkan konsep AWK, analisis harus mencakupi tiga tahap, yaitu deskripsi, interpretasi, dan eksplanasi (Fairclough 2001: 21—22). Deskripsi adalah analisis terhadap unsur-unsur formal sebuah teks. Dalam hal ini, analisis terhadap teks untuk menemukan bentuk representasi tersebut dilakukan dengan menggunakan teori Linguistik Fungsional Sistemik (LFS) yang dikemukakan oleh Halliday (1994) yang dikembangkan oleh Martin dan Rose (2003). Teori LFS ini digunakan untuk mengidentifikasi makna ideasional atau representasional suatu klausa pembentuk teks. Oleh karena itu, satuan analisis dalam penelitian ini adalah klausa. Hasil deskripsi tersebut kemudian dikaitkan dengan konteks yang ada dalam benak peneliti dalam bentuk *members' resource* (MR), yaitu pengetahuan peneliti sebagai pihak yang melakukan interpretasi (Fairclough 2001: 118). Tahapan ini juga bertujuan untuk

menginterpretasi kemungkinan MR seperti apa yang digunakan oleh penghasil teks (baca: insan media) pada waktu menghasilkan teks. Hasil dari tahapan analisis ini kemudian digunakan untuk melakukan tahapan selanjutnya, yaitu eksplanasi. Dalam tahap ini peneliti menjelaskan praksis sosial seperti apa yang mempengaruhi institusi media melakukan praksis wacana tertentu, dalam hal ini adalah merepresentasikan peristiwa banjir.

ANALISIS WACANA KRITIS (AWK)

Di dalam AWK, bahasa adalah bentuk dari praksis sosial (Fairclough 2001: 18). Pernyataan ini mengandung beberapa implikasi yang menjadi dasar dari konsep AWK. Yang pertama, bahasa adalah bagian dari masyarakat, sehingga fenomena bahasa merupakan fenomena sosial (Fairclough 2001:19). Cara seseorang berbahasa ditentukan oleh kondisi sosial masyarakat. Dalam berbahasa, seseorang dapat menentukan kondisi sosial tertentu. Sebaliknya, fenomena sosial merupakan bagian dari fenomena bahasa (Fairclough 2001: 19). Artinya, seseorang menggunakan bahasa dalam melakukan tindak sosial.

Implikasi yang kedua menurut Fairclough (2001: 19) adalah bahwa menggunakan bahasa merupakan suatu praksis wacana yang menjadi bagian dari praksis sosial. Menggunakan bahasa merupakan praksis wacana yang mencakupi proses memproduksi atau menghasilkan teks dan proses mengkonsumsi atau menginterpretasi teks. Dalam proses produksi maupun konsumsi, penghasil teks maupun penerima teks akan dipengaruhi oleh struktur sosial masing-masing. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan oleh penghasil teks belum tentu dimaknai dengan cara yang sama oleh penerima teks. Bagan yang menunjukkan hubungan antara teks, wacana, dan struktur sosial dapat dilihat dalam Fairclough (1995: 59 dan 2001: 21). Teks sebagai hasil dari proses produksi dapat berupa tuturan verbal yang dimanifestasikan dalam bentuk tulisan atau bunyi bahasa. Dalam melakukan praksis wacana, penghasil teks (baca: penutur) tidak semata-mata merefleksikan objek, tetapi melakukan tiga tindak, yaitu tindak membangun identitas sosial, menentukan relasi sosial, dan merepresentasikan peristiwa sosial (Fairclough 1995: 55). Fairclough (2003: 26) menambahkan bahwa penghasil teks dalam praksis wacana juga melakukan tindak yang menghasilkan suatu genre teks tertentu pula. Berdasarkan proses tersebut, teks dapat dimaknai sebagai tindakan, representasi, dan identifikasi (Lihat Fairclough 2003: 27).

KOMUNIKASI DALAM MEDIA MASSA

Peristiwa komunikasi yang terjadi dalam media massa memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dari peristiwa komunikasi yang lain, seperti peristiwa komunikasi antara dokter dan pasien, guru dan murid, atau orang tua dan anak. Salah satu parameter yang membedakan komunikasi dalam media massa dan bentuk komunikasi lain tersebut adalah dimensi ruang dan waktu. Dalam komunikasi antara dokter dan pasien, guru dan murid, atau orang tua dan anak, proses produksi, yaitu proses menuturkan pesan, dan proses konsumsi, yaitu proses menerima pesan, pada umumnya berada dalam waktu dan tempat yang sama. Bentuk komunikasi ini sering disebut komunikasi semuka (*face to face communication*). Sebaliknya, di dalam komunikasi di media massa, tempat dan

waktu yang digunakan dalam proses produksi tidak sama dengan proses konsumsi atau proses pembacaan (Fairclough 1995: 36). Selain ruang dan waktu, kekhususan lain yang dimiliki oleh komunikasi dalam media massa adalah ihwal proses produksi itu sendiri. Berita yang kita baca ternyata merupakan hasil dari rentetan peristiwa komunikasi yang sangat panjang. Proses itu dimulai dari pengumpulan sumber berita yang kemungkinan melibatkan peristiwa komunikasi dalam bentuk wawancara dengan narasumber. Dalam proses ini, narasumber berperan sebagai penghasil teks (*text producer*) sedangkan pencari berita sebagai penerima teks (*text consumer*). Selanjutnya, pencari berita berperan sebagai penghasil teks, yang mendokumentasikan hasil wawancara tersebut dalam bentuk draft dan diserahkan kepada dewan redaksi. Dalam proses ini terjadi peristiwa komunikasi antara pencari sumber dan dewan redaksi, sebagai penerima teks. Proses selanjutnya adalah proses penyuntingan, yaitu dewan redaksi menambah, mengurangi, atau mengubah draft yang dihasilkan oleh pencari berita, untuk selanjutnya dicetak dan dikonsumsi oleh pembaca. Pada proses yang terakhir ini, dewan redaksi berperan sebagai penghasil teks dan pembaca sebagai penerima teks. Dari rangkaian proses produksi yang sangat panjang itu, setiap tahapan produksi senantiasa dibentuk (baca: dipengaruhi) oleh praksis wacana yang lain, seperti praksis wacana dalam ranah ekonomi, politik, dan teknologi. Dengan demikian, dalam setiap proses produksi tersebut, penghasil teks menggunakan cara pandang yang dipengaruhi oleh faktor-faktor di atas. Dengan kata lain, dalam memproduksi teks, seorang penghasil teks berpotensi untuk memasukkan ideologi tertentu dalam praksis wacana tersebut.

Ciri lain yang terdapat dalam peristiwa komunikasi dalam media massa adalah relasi antara penghasil teks dan penerima teks. Penghasil teks tidak dapat bersemuka dengan penerima teks sehingga penghasil teks harus memperkirakan seperti apa khalayak yang akan membaca teks tersebut. Dalam hal ini, penghasil teks akan mempostulasikan dan menciptakan ‘pembaca ideal’ dan memposisikan ‘pembaca ideal’ tersebut memiliki pengetahuan tertentu, sehingga bentuk teks yang dihasilkan disesuaikan dengan pengetahuan dari ‘pembaca ideal’ yang dibentuk tersebut (Fairclough 1995: 40). Dengan demikian, penghasil teks harus memiliki pengetahuan tentang apa yang menjadi pengetahuan umum atau apa yang dipraanggapan oleh masyarakat pembacanya. Konsep praanggapan inilah yang berpotensi untuk menyembunyikan gagasan-gagasan ideologis dari pihak tertentu untuk mempertahankan kuasa (Fairclough 2001: 128).

Penjelasan di atas mengandung suatu implikasi bahwa pada setiap tahapan produksi, faktor sosiokultural yang di dalamnya mengandung nilai-nilai ideologis tertentu mempengaruhi cara penghasil teks merepresentasikan suatu peristiwa, mengonstruksi identitas sosial, dan mengkomunikasikan relasi sosial. Dengan kata lain, bentuk pemberitaan dalam sebuah media massa merupakan hasil praksis wacana yang sangat kompleks.

NILAI IDEOLOGIS DALAM SLOGAN SUARA MERDEKA

Bagian ini akan mendeskripsikan ihwal slogan yang digunakan dalam institusi surat kabar harian *Suara Merdeka* sebagai bagian dari informasi kontekstual yang relevan untuk memahami teks dalam penelitian ini. Informasi lengkap mengenai

sejarah dan perkembangan *Suara Merdeka* dapat dilihat dalam Perwirawati (2012). Di dalam makalah ini, saya hanya akan menjelaskan informasi yang relevan tentang perkembangan *Suara Merdeka* tersebut yang saya sarikan dari laporan Perwirawati (2012) tersebut.

Suara Merdeka adalah salah satu surat kabar harian terkemuka di Jawa Tengah. *Suara Merdeka* didirikan pada tanggal 11 Februari 1950 oleh H. Hetami. Pada awalnya, *Suara Merdeka* merupakan surat kabar yang memposisikan dirinya sebagai media untuk menyuarakan rakyat yang baru saja merdeka. Untuk itu, harian ini memiliki slogan “Harian Umum untuk Mempertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia”. Seiring dengan perkembangan politik yang terjadi di Indonesia, pada masa orde baru *Suara Merdeka* mengubah slogannya menjadi “Independen, Objektif, Tanpa Prasangka”. Slogan baru ini mengandung misi universal dalam dunia pemberitaan. Namun, dengan slogan tersebut, pemilik *Suara Merdeka* sebenarnya hendak menunjukkan pemikiran ideologisnya bahwa *Suara Merdeka* pada waktu itu tidak mau condong pada salah satu kelompok/partai tertentu (Perwirawati 2012). Seiring dengan perubahan sistem pemerintahan yang mengarah ke sistem desentralisasi, *Suara Merdeka* mengubah slogannya menjadi “Perekat Komunitas Jawa Tengah”. Perubahan slogan tersebut mengandung dua implikasi. Pertama, pemerintahan desentralisasi menyebabkan peristiwa sosial yang terjadi di daerah lebih bermakna. Oleh karena itu, peristiwa tersebut layak untuk diberitakan. Konsekuensi dari kondisi ini adalah bertumbuhnya koran-koran lokal baru seperti *Wawasan*, *Harian Semarang*, *Radar Solo*, *Radar Semarang*, *Semarang Post*, *Meteor*, *Radar Kedu*, dan *Radar Tegal-Pekalongan*. Dengan slogan “Perekat Komunitas Jawa Tengah”, *Suara Merdeka* hendak menunjukkan bahwa koran inilah yang lingkupnya paling luas di antara koran-koran lokal di Jawa Tengah. Koran ini memposisikan diri memiliki pembaca yang tersebar di seluruh Jawa Tengah. Implikasi ini berkaitan dengan strategi pemasaran dan persaingan dengan koran-koran lokal lain. Implikasi kedua lebih bersifat ideologis. Artinya, dengan mengganti slogan sebelumnya menjadi slogan baru tersebut, *Suara Merdeka* terkesan lebih mengedepankan aspek ekonomi daripada aspek idealisme jurnalistik. Nilai independen, objektif, dan tidak berprasangka bukan lagi sebagai nilai ideologis yang diungkapkan secara eksplisit. Hal ini sesuai dengan paradigma baru, bahwa menyampaikan berita secara objektif tidak dapat direalisasikan secara mutlak.

Penggantian slogan suatu surat kabar akan mempengaruhi segala aspek dalam praktik sosial dalam surat kabar tersebut. Demikian juga halnya dengan yang terjadi di *Suara Merdeka*. Slogan ‘Perekat Komunitas Jawa Tengah’ mengusung nilai pemersatu, alih-alih pemecah belah. Oleh karena itu, *Suara Merdeka* memiliki kebijakan bahwa berita yang disampaikan bersifat tenang, datar, dan tidak bombastis. Penyampaian kritik harus dilakukan dengan cara tenang dan tidak meledak-ledak (Perwirawati 2012). Kata *perekat* juga mengandung implikasi bahwa dalam pemberitaannya, *Suara Merdeka* mengedepankan keserasian antara kebijakan redaksional dan kepentingan *stakeholder* yang antara lain terdiri atas pemerintah, aparat keamanan, pelanggan, dan organisasi sosial. Nilai ini diterapkan dalam setiap langkah dalam proses pemberitaan mulai dari peliputan dan pelaporan oleh seorang wartawan, *editing* dan *re-writing* oleh kepala *desk* dan *desk staff*, sampai pada pengendalian seluruh

ini berita/opini oleh redaktur pelaksana (Perwirawati 2012). Nilai kebijakan lain yang harus diikuti oleh seluruh awak surat kabar *Suara Merdeka* adalah mengedepankan hal-hal baru (kekinian berita); mengandung informasi tentang siapa, apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana; memperkuat berita utama dengan sisi lain sebuah berita; serta menyadari bahwa unsur subjektifitas tidak dapat dihindari (Perwirawati 2012).

BERBAGAI PERISTIWA SOSIAL YANG DIREPRESENTASIKAN DALAM PEMBERITAAN “SEMARANG DAN KENDAL TERENDAM” (5 FEBRUARI 2014)

Seperti halnya pemberitaan genre *hard news* yang lain, pemberitaan *hard news* dengan judul “Semarang dan Kendal Terendam” yang diterbitkan pada tanggal 5 Februari 2014 tersebut memuat berita utama tentang peristiwa banjir yang melanda daerah Semarang dan Kendal pada tanggal 3 Februari 2014. Berita utama ini dikemas dalam formula apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana (5W 1H).

Dalam merepresentasikan peristiwa banjir tersebut, *Suara Merdeka* secara umum memposisikan *hujan* dan *banjir* sebagai pelaku peristiwa (*actor*) dan wilayah, genangan, jalan, rumah sebagai entitas yang dikenai proses (*goal*). *Banjir* dan *hujan* melakukan proses material dan relational. Dalam pemberitaan tersebut, *Suara Merdeka* menambahkan informasi lain yang mencakupi kapan terjadi banjir, berapa ketinggian banjir, di mana terjadi banjir, dan bagaimana intensitas banjir dalam elemen sirkumstan. Rangkuman pemberitaan yang memposisikan banjir dan hujan sebagai pelaku tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 1: Makna Ideasional dari Teks “Semarang dan Kendal Terendam Banjir”

Pelaku, Eksisten	Proses		Tujuan, Atribut	Sirkumstan
	Material	Relasional		
Hujan, Banjir, Air, Air bah	Merendam, masuk, mengguyur, meneror, melumpuhkan, menerjang, melanda, meluap, meluas,	Mengakibatkan, berdampak, menyebabkan, terjadi, bisa diukur, berulang, takseparah, lebih besar	Wilayah, kawasan, kota, rumah, jalan, genangan,	Sektar pukul 2, Senin petang (3/2) hingga Selasa (4/2), setiap tahun di musim hujan, di sepuluh kecamatan, di jalan raya tersebut, hingga ke rumah-rumah warga, dengan ketinggian 15 cm, hingga ketinggian 50 cm, hampir satu meter, cukup parah,

Berdasarkan tabel di atas, peristiwa banjir direpresentasikan sebagai tindakan alam terhadap manusia sehingga mengakibatkan kerugian manusia.

Verba yang digunakan untuk mengungkapkan proses material seperti yang terdapat dalam tabel tersebut mengimplikasikan bahwa banjir dan air hujan melakukan perbuatan jahat terhadap manusia. Kata-kata seperti *meneror*, *melumpuhkan*, dan *menerjang* adalah kata-kata yang biasa digunakan untuk mengungkapkan suatu permusuhan. Kata *melanda* senantiasa disandingkan dengan hal-hal yang negatif, sedangkan kata *merendam* dan *masuk* dapat bernuansa positif atau negatif bergantung pada elemen lain yang menyertainya. Namun, dalam teks ini, kata *merendam* dan *masuk* berkonotasi negatif karena disandingkan dengan (*merendam*) *sejumlah wilayah dan (air masuk) rumah*. Pihak yang dikenai proses tersebut adalah manusia karena rumahnya, jalannya, dan wilayahnya menjadi rusak. Pilihan kata yang spesifik untuk mengungkapkan korban aktivitas banjir dan hujan mulai dari *rumah, kelurahan, kecamatan, wilayah, kota*, dan *nama jalan* menunjukkan bahwa informasi besaran kerusakan itu merupakan informasi penting bagi pembaca. Selain mengungkapkan banjir sebagai pelaku proses material tersebut, *Suara Merdeka* juga merepresentasikan banjir sebagai eksisten atau *carrier* yang melibatkan proses relasional. Sama halnya dengan perannya sebagai pelaku dalam proses material, banjir dan air yang direpresentasikan dalam peristiwa relasional juga diposisikan sebagai entitas yang menyebabkan manusia mengalami kerugian. Lihatlah contoh data di bawah ini:

- 1) Hujan mengakibatkan sejumlah wilayah di Kota Semarang lumpuh
- 2) Air yang meluap menyebabkan genangan air disertai arus...
- 3) Dampak hujan yang terjadi selama hampir satu hari tersebut juga mengakibatkan longsor di 19 lokasi

Dalam tiga klausa di atas, banjir memang digambarkan tidak melakukan tindakan apapun (bandingkan dengan banjir sebagai pelaku dalam proses material). Namun, *banjir, air hujan, dan luapan sungai* merupakan penyebab dari *genangan, longsor, dan keadaan kota lumpuh*. Ini berarti *Suara Merdeka* tetap menggambarkan banjir secara negatif. Berbeda halnya apabila banjir digambarkan sebagai akibat dari kesalahan manusia dalam memperlakukan alam. Dalam proses relasional, banjir juga direpresentasikan sebagai peristiwa yang selalu terjadi secara periodik sehingga banjir yang terjadi dalam suatu waktu dibandingkan dengan peristiwa yang sama pada waktu-waktu sebelumnya. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa peristiwa banjir itu sendiri bukanlah peristiwa yang luar biasa bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya. Menjadi luar biasa apabila dampak yang dihasilkan oleh banjir tersebut merugikan masyarakat dalam skala yang besar. Itulah sebabnya, informasi lain yang dianggap penting dalam pemberitaan itu adalah waktu terjadinya banjir, tingkat ketinggian banjir, dan perbandingannya dengan peristiwa yang sama yang terjadi sebelumnya.

Selain merepresentasikan peristiwa banjir itu sendiri, *Suara Merdeka* dalam *hard news* tersebut juga memberitakan peristiwa sosial lain, yaitu penjelasan narasumber yang berkaitan dengan peristiwa banjir tersebut. Dalam data ditemukan dua kelompok narasumber, yaitu narasumber dari golongan masyarakat awam dan dari kelompok pemangku jabatan. Dari golongan masyarakat awam, wartawan *Suara Merdeka* memilih seorang karyawan supermarket, dua warga biasa dan ketua RT. Menilik dari penjelasan keempat

narasumber tersebut, seperti wartawan menanyakan kesaksian mereka pada waktu banjir terjadi. Kesaksian itu dilaporkan dalam bentuk kutipan langsung dan kutipan taklangsung. Peristiwa yang dikisahkan oleh para narasumber tersebut adalah antrean panjang kendaraan, tingkat keparahan banjir tahun ini dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ketinggian air dalam rumah, tingginya genangan, kapan air meluap, dan kapan air surut. Di dalam penceritaan tersebut, para narasumber juga memosisikan air, genangan, dan banjir sebagai pelaku maupun eksisten. Artinya, apa yang direpresentasikan para narasumber tersebut senada dengan apa yang direpresentasikan dalam narasi utama penulis berita. Fungsi dari testimoni warga ini adalah untuk memperkuat akurasi pemberitaan.

Narasumber kelompok kedua adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, Wali Kota Semarang, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang, dan Ketua DPRD Kota Semarang. Dua narasumber yang pertama mewakili badan eksekutif dan dua yang terakhir mewakili lembaga legislatif. Berbeda dari kelompok narasumber yang berasal dari masyarakat, kelompok narasumber ini lebih mengemukakan kebijakan alih-alih peristiwa banjir itu sendiri. Peristiwa sosial yang mereka representasikan lebih pada dampak dari banjir tersebut. Sebagai contoh, peristiwa sosial yang diungkapkan dalam penjelasan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah sebagai berikut.

- 4) Dampak hujan yang terjadi selama hampir satu hari tersebut mengakibatkan longsor di 19 lokasi dan merenggut dua korban jiwa....
- 5) Jika dampak bencana semakin meluas, tak menutup kemungkinan akan diberlakukan status darurat bencana.
- 6) “Status darurat bencana baru berakhir pada 31 Januari 2014 sejak diberlakukan per 24 Januari.”
- 7) “Tapi jika kondisinya seperti ini, bisa saja diberlakukan lagi.”
- 8) Bencana yang terjadi di awal tahun 2014 ini lebih parah dibanding dari periode yang sama tahun lalu.
- 9) Namun jumlah warga yang diungsikan belum terlalu banyak.
- 10) “Sampai Selasa siang hanya ada 11 warga di Trimulyo, Kecamatan Genuk yang masih bertahan di penampungan sementara. Tapi ungsian secara massif belum ada.”

Dari tujuh tuturan narasumber yang dilaporkan, empat tuturan merepresentasikan dampak dari peristiwa banjir tersebut, yaitu tuturan (4), (5), (9), dan (10). Sementara itu, tuturan (6) dan (7) berkenaan dengan status darurat bencana yang merupakan tindak lanjut dari munculnya (dampak) bencana tersebut. Pilihan informasi yang dilaporkan tersebut seturut dengan tanggung jawab narasumber sebagai petugas penanggulangan bencana. Artinya, dalam melakukan interview, wartawan *Suara Merdeka* menggunakan *member resource* yang lazim dimiliki oleh masyarakat, bahwa urusan petugas penanggulangan bencana berkisar masalah dampak, penetapan status, sampai pada pengungsian. Satu hal yang menarik untuk dicermati dalam laporan di atas adalah tuturan yang membandingkan bencana tahun ini dengan bencana sebelumnya. Tuturan seperti

ini telah muncul dua kali, yaitu dalam narasi besar *hard news* dan dalam tuturan narasumber warga biasa. Ini berarti bahwa pola pikir ‘membandingkan bencana tahun ini dengan bencana sebelumnya’ merupakan pola pikir umum dalam masyarakat pembaca. Sementara itu, narasumber ke dua dari badan eksekutif adalah Wali Kota Semarang. Informasi yang dipilih untuk dilaporkan dalam *hard news* ini adalah tuturan Wali Kota Semarang tentang perpanjangan status darurat bencana, hasil pantauan wilayah yang dilanda banjir, dan tindak fisik dalam menanggulangi bencana, yaitu membangun dapur umum dan melakukan pembersihan air.

Bagian lain yang juga menarik untuk dicermati dalam teks ini adalah tuturan narasumber dari lembaga legislatif dan bagaimana pihak *Suara Merdeka* mewacanakan tuturan tersebut. Pertama, verba yang digunakan untuk merepresentasikan proses verbal berupa verba yang mengandung muatan sudut pandang wartawan, yaitu *menegaskan* dan *menandaskan*. Lihatlah contoh berikut.

- 11) Didik Marsudi, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang *menegaskan* kasus banjir yang terulang tiap tahun menunjukkan Pemkot Semarang minim perencanaan dan lamban dalam penyikapan.

Dalam contoh (11), pembaca mengetahui pandangan narasumber melalui kalimat dan kata-kata yang dipilih oleh wartawan. Bagaimana tuturan asli dari Ketua Komisi C tersebut, hanya wartawan yang mengetahui. Oleh karena itu, pilihan kata *menegaskan* adalah otoritas wartawan. Mengapa ia menggunakan kata *menegaskan* alih-alih *mengatakan*, misalnya? Kemungkinan wartawan memadukan cara narasumber bertutur dengan elemen paralinguistik yang digunakan, seperti intonasi, mimik muka, dan bahasa tubuh yang lain. Tuturan dengan intonasi naik turun yang sangat dinamis dapat diinterpretasi sebagai tindak menegaskan. Kata *menegaskan* mengandung makna ‘menyatakan dengan tidak ragu-ragu’. Artinya, dibandingkan dengan *mengatakan*, wartawan ingin memperlihatkan bahwa dalam (11) narasumber yakin apa yang dituturkan benar. Yang ditegaskan dalam contoh tersebut adalah tindakan menuduh Pemkot Semarang minim perencanaan dan lamban dalam penyikapan. Tindak tutur Ketua Komisi C yang lain dapat disimak dalam contoh berikut.

- 12) Untuk mengatasi banjir, seharusnya bisa menggunakan perencanaan penanganan dengan site plan drainase peninggalan Belanda, atau site plan drainase pemkot yang dibuat tahun 1993 dan tahun 1997.
- 13) “Pertanyaannya kenapa itu tidak digunakan untuk melakukan penataan drainase di Kota Semarang.”
- 14) “Padahal konsep itu sangat baik untuk penanganannya dari hulu hingga hilir.”
- 15) Dalam penanganan banjir, juga harus terjalin kerja sama.
- 16) Program yang direncanakan masing-masing dinas harus sinkron, sehingga tak saling tumpang tindih.
- 17) “Selama ini sinkronisasi program itu masih lemah. Khususnya di Dinas Binamarga dan Dinas PSDA-ESDM.”

- 18) “Padahal keduanya memiliki peran besar dalam upaya penyelesaian banjir,”

Tuturan (12) dan (13) menempatkan pemerintah sebagai pelaku, *menggunakan* sebagai proses material, dan *perencanaan penanganan dengan site plan drainase peninggalan Belanda*, atau *site plan drainase pemkot yang dibuat tahun 1993 dan tahun 1997* sebagai tujuan. Namun, kata *seharusnya* dalam (12) dan kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya *mengapa* dalam (13) menunjukkan bahwa penutur ingin menunjukkan bahwa yang seharusnya dilakukan pemerintah, tidak dilakukan. Dalam kaitannya dengan relasi sosial antara badan eksekutif dan badan legislatif, tuturan tersebut mengandung makna ‘menyalahkan pemerintah’. Tuturan (14) berfungsi mempertegas tindak tutur sebelumnya. Cara bertutur yang senada terdapat dalam contoh (15) sampai (17). Penggunaan kata *harus* dan *padahal* mempertegas tindak menuduh atau menyalahkan.

Dari paparan di atas, kita dapat melihat bahwa pemberitaan peristiwa banjir yang dikemas dalam hard news “**Semarang dan Kendal Terendam**” merepresentasikan dunia fisik, dunia mental, dan dunia sosial. Dunia fisik yang direpresentasikan adalah peristiwa banjir itu sendiri, dampak banjir, dan penanggulangan banjir. Dalam merepresentasikan peristiwa banjir, yang dilaporkan adalah waktu terjadinya banjir, lokasi banjir, ketinggian banjir, dan perbandingannya dengan banjir-banjir sebelumnya. Dalam merepresentasikan dampak banjir, pihak *Suara Merdeka* memilih untuk melaporkan dampak ekonomis, alih-alih kesehatan, pendidikan, dan aspek kehidupan lain. Sementara itu, penanggulangan banjir direpresentasikan melalui pemberitaan tentang pemberlakuan status darurat bencana, pendirian dapur umum, dan pembersihan selokan. Dunia mental yang dilaporkan dalam pemberitaan tersebut adalah sikap *Suara Merdeka* dalam mengungkapkan banjir melalui kata-kata seperti *banjir* dan *air bah* yang melakukan tindak kurang menyenangkan seperti *menerjang*, *mengguyur*, *merendam*, *melanda*, *melumpuhkan*, dan *meneror*. Pemberitaan peristiwa verbal dari masyarakat yang berupa testimoni sesungguhnya mengimplikasikan sikap penulis berita bahwa informasi yang dapat digali dari masyarakat hanya sebatas testimoni. Bandingkan dengan informasi yang berupa sikap dan gagasan yang berasal dari para pemegang jabatan. Sementara itu, dunia sosial direpresentasikan secara tidak langsung melalui pilihan narasumber dari badan eksekutif dan legislatif. Pemberitaan tersebut seolah menjadi ajang pertarungan antara kedua badan tersebut.

CARA MEREPRESENTASIKAN ELEMEN SOSIAL DALAM PEMBERITAAN “SEMARANG DAN KENDAL TERENDAM” (5 FEBRUARI 2014)

Bagian ini membahas penggunaan bahasa yang mengungkapkan cara media *Suara Merdeka* merepresentasikan peristiwa-peristiwa sosial dalam pemberitaan banjir tersebut. Pembahasan ini akan dikelompokkan menjadi empat kelompok, sesuai dengan masalah penelitian nomer 2 yang telah ditetapkan dalam bagian pendahuluan. Keempat kelompok itu adalah (i) cara memilah peristiwa yang

diberitakan dan yang tidak diberitakan; (ii) kelugasan pemberitaan; (iii) pelataran pemberitaan; dan (iii) tematisasi pemberitaan.

Dalam proses pemberitaan, media memiliki otoritas untuk menentukan informasi apa yang hendak diberitakan dan informasi apa yang tidak akan diberitakan. Cara media melakukan seleksi ini dipengaruhi oleh elemen-elemen sosial yang terdapat dalam *member resource* penulis. Elemen tersebut antara lain berupa nilai sosial suatu kelompok masyarakat, ideologi, relasi sosial, dan institusi sosial. Dengan demikian, analisis tentang informasi yang diberitakan dan informasi yang seharusnya diberitakan tetapi tidak diberitakan mencerminkan pengaruh *member resource* dalam proses pemberitaan tersebut. Alat kebahasaan yang dapat digunakan untuk menyeleksi informasi antara lain adalah nominalisasi dan presuposisi.

Hasil analisis yang telah dibahas pada bagian sebelumnya menunjukkan bahwa dalam narasi utama, *Suara Merdeka* memposisikan air hujan dengan intensitas tinggi sebagai penyebab banjir. Informasi inilah yang dimasukkan dalam pemberitaan. Sementara itu, pembaca pada umumnya juga memiliki *member resource* yang berupa informasi bahwa banjir dapat disebabkan oleh kesalahan manusia dalam menata lingkungan. *Suara Merdeka* tidak memberitakan informasi tersebut secara eksplisit. Alasannya mungkin pemberitaan tersebut akan menyebabkan pihak-pihak yang melakukan kesalahan penataan merasa kurang nyaman. Dalam konteks ini, media *Suara Merdeka* menghindari konflik dengan pihak-pihak terkait. Kritik atas kesalahan manusia sebagai penyebab banjir disampaikan dengan menggunakan pernyataan dari narasumber, yang antara lain adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang (lihat contoh 12 sampai 18).

Cara lain yang diterapkan oleh *Suara Merdeka* dalam memilah informasi apa yang disampaikan dan informasi apa yang ada tetapi tidak disampaikan adalah melalui nominalisasi. Dalam analisis sebelumnya, telah dijelaskan bahwa suatu peristiwa terdiri atas beberapa elemen, seperti pelaku peristiwa, proses, tujuan, dan sirkumstan yang menginformasikan kapan, di mana, seperti apa, dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam tindak wacana, penyampaian peristiwa itu dapat dipadatkan dengan menggunakan nomina dibentuk dari bentuk dasar verba, yang disebut nominalisasi. Artinya, dalam nominalisasi ini sebuah peristiwa dipersepsi sebagai sebuah entitas. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya beberapa elemen peristiwa yang dihilangkan (baca: tidak disampaikan).

Di dalam teks “**Semarang dan Kendal Terendam**” terdapat beberapa klausa yang mengandung nominalisasi, seperti dalam contoh berikut.

- 19) Didik Marsudi, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang menegaskan kasus banjir yang terulang tiap tahun menunjukkan Pemkot Semarang minim *perencanaan* dan lamban dalam *penyikapan*. Untuk mengatasi banjir, seharusnya bisa menggunakan *perencanaan penanganan* dengan site plan drainase peninggalan Belanda, atau site plan drainase Pemkot yang dibuat tahun 1993 dan tahun 1997. “Pertanyaannya kenapa itu tidak digunakan untuk melakukan *penataan* drainase di Kota Semarang. Padahal konsep itu sangat baik untuk *penanganannya* dari hulu hingga hilir,” katanya. Dalam *penanganan* banjir, juga harus terjalin kerja sama. Program yang direncanakan masing-masing dinas harus sinkron,

sehingga tak saling tumpang tindih. “Selama ini *sinkronisasi* program itu masih lemah. Khususnya di Dinas Binamarga dan Dinas PSDA-ESDM. Padahal keduanya memiliki peran besar dalam upaya *penyelesaian* banjir,” tandasnya.

- 20) Sementara Wiwin Subiyono, Ketua DPRD Kota Semarang menegaskan, *pelanggaran* aturan tata ruang memiliki pengaruh besar dalam kasus bencana. (59) *Hilangnya* daerah hijau dan semakin *berkurangnya* daerah resapan menjadi penyebab memburuknya bencana banjir. (60) “Pemkot saat ini berkewajiban menata drainase kota, seperti drainase jalan dan drainase perumahan. Termasuk komitmennya pada soal wilayah konservasi, atau *penambahan* lahan hijau,” tegasnya.

Dua paragraf dalam contoh di atas merupakan tuturan dua narasumber yang dilaporkan baik dalam bentuk kutipan langsung maupun tidak langsung. Kedua narasumber tersebut merepresentasikan suara institusi legislatif yang memiliki fungsi utama mengawasi kinerja pemerintah. Penggunaan nominalisasi seperti *perencanaan*, *penanganan*, *penataan*, *penyikapan*, *penyelesaian*, *pelanggaran*, *sinkronisasi*, *hilangnya*, dan *berkurangnya* digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa yang tentunya ada pelaku, tindakan atau kejadian, pihak yang dikenai tindakan, pihak yang mengalami kejadian, tempat kejadian, waktu kejadian, dan cara melakukan tindakan. Namun, alih-alih secara eksplisit mengungkapkan serangkaian informasi tersebut, narasumber mengemas serangkaian informasi tersebut secara padat dalam bentuk nominalisasi. Konteks sosial yang kemungkinan melatari cara berwacana secara ringkas tersebut antara lain adalah asumsi bahwa masyarakat telah memiliki pengetahuan akan siapa pelakunya dan apa atau siapa pihak yang dikenai tindakan tersebut. Sebagai contoh, dalam tuturan “... Pemkot Semarang minim *perencanaan* dan lamban dalam *penyikapan*.” Penutur lebih menekankan informasi tentang cara melakukan tindakan, yaitu minim dan lamban, daripada mengungkapkan informasi Pemkot Semarang telah merencanakan dan menyikapi (banjir). Dengan demikian, penggunaan nominalisasi, dalam konteks ini, dilakukan oleh penutur untuk menyeleksi informasi mana yang perlu dinyatakan dan informasi mana yang diasumsikan. Contoh lain ihwal penggunaan nominalisasi ini ada pada kata *pelanggaran*, *hilangnya* dan *berkurangnya* yang terdapat dalam contoh (20). Dalam tuturan tersebut, penggunaan ketiga nominalisasi menyembunyikan pelaku. Siapa yang melanggar, siapa yang menghilangkan, dan siapa yang mengurangi tidak diungkapkan. Pembaca dibiarkan menerka-nerka sendiri siapa para pelaku tersebut. Selain asumsi bahwa pembaca sudah memiliki informasi siapa pelaku yang dimaksud oleh penutur, interpretasi lain yang dapat diperoleh atas cara penuturan tersebut adalah penutur tidak mau menyebutkan dengan jelas siapa sebenarnya pelaku ketiga tindakan tersebut. Menyebutkan dengan jelas siapa pelakunya akan menjadi tuduhan dan fitnah apabila tidak disertai dengan bukti-bukti yang memadai. Faktor inilah yang mungkin dihindari oleh penutur.

Terlepas dari intensi penutur dalam mengungkapkan pesan melalui wacana dalam kedua contoh di atas, kita dapat menginterpretasi intensi pihak media dalam memilih bagian tuturan narasumber yang dikutip untuk dijadikan berita. Kutipan tersebut secara umum merupakan kritik pihak legislatif terhadap kinerja

pemerintah dalam menangani banjir. Oleh karena itu, memilih bagian kutipan tersebut sebagai bagian dari berita kemungkinan dilakukan oleh pihak redaksi untuk menunjukkan aspek kritis dalam pemberitaan.

Pada penjelasan sebelumnya telah disebutkan bahwa jejak yang ditinggalkan oleh penulis berita yang menggambarkan proses pemberitaan (baca: wawancara) selain nominalisasi adalah presuposisi. Dalam data yang dianalisis ditemukan sejumlah presuposisi yang sebagian di antaranya digunakan untuk menunjukkan muatan ideologis tertentu. Perhatikan contoh-contoh di bawah ini.

- 21) Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Mangkang Wetan, ... mengatakan banjir kali ini *tak separah* banjir bandang tahun 2010
- 22) Banjir kali ini *lebih besar* dibanding dengan beberapa kali sebelumnya.
- 23) Iwan menambahkan, bencana yang terjadi di awal tahun 2014 ini *lebih parah* dibanding dari periode yang sama tahun lalu.

Penggunaan ungkapan perbandingan dalam ketiga contoh di atas menghasilkan makna presuposisi: (i) 'Tahun 2010 terjadi banjir bandang.'; (ii) 'Sebelumnya terdapat beberapa kali banjir'; dan (iii) 'Tahun lalu, dalam periode yang sama terjadi banjir.'. Ketiga informasi ini diasumsikan menjadi pengetahuan umum yang tersimpan dalam *member resource* pembaca. Artinya, penutur, dalam hal ini adalah narasumber dan pihak media menganggap pembaca dan masyarakat pada umumnya memiliki pengetahuan bahwa banjir adalah peristiwa yang biasa terjadi setiap tahun di daerah Semarang dan sekitarnya. Oleh karena itu, setiap terjadi banjir, orang akan selalu membandingkan peristiwa tersebut dengan peristiwa sama yang terjadi sebelumnya ihwal tingkat keparahannya. Cara pandang seperti ini telah menjadi cara pandang bersama dalam masyarakat, terbukti dari tiga tuturan dari sumber yang berbeda dalam contoh di atas. Artinya, cara berpikir bahwa setiap ada banjir masyarakat selalu akan membandingkan dengan peristiwa banjir sebelumnya telah menjadi cara berpikir yang sifatnya ideologis. Cara pandang ini akan menghegemoni masyarakat bahwa peristiwa banjir adalah peristiwa alam yang harus kita terima. Kita hanya dapat melihat apakah peristiwa banjir ini lebih parah atau tidak dibanding peristiwa yang sama pada tahun-tahun sebelumnya. Cara berpikir seperti itu akan menjauhkan masyarakat dari cara berpikir yang kritis bahwa sebagian besar penyebab banjir adalah kesalahan manusia dalam memperlakukan alam. Hal ini terbukti bahwa penggunaan presuposisi dalam pemberitaan mengindikasikan adanya pandangan ideologis tertentu yang dinaturalisasikan sehingga cara pandang itu nantinya menjadi '*way of life*' dalam masyarakat.

Selain ihwal seleksi peristiwa sosial yang hendak direpresentasikan, media juga mempertimbangkan cara merepresentasikan peristiwa sosial yang telah diseleksi tersebut. Dalam makalah ini, saya akan membedakan peristiwa sosial yang direpresentasikan secara eksplisit dari peristiwa sosial yang direpresentasikan secara implisit. Untuk menemukan informasi ini, konsep eksplikatur dan implikatur akan sangat membantu.

Tidak semua informasi yang berkaitan dengan peristiwa banjir di Semarang dan sekitarnya diungkapkan secara eksplisit oleh pihak media maupun narasumber. Ada informasi yang baru dapat dimengerti setelah pembaca

mengaitkan informasi yang tersurat dengan konteks yang relevan. Sebagai contoh, berikut adalah ungkapan dari narasumber, yaitu Iwan Budi Setyawan (Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang), yang dikutip oleh *Suara Merdeka* dalam pemberitaannya.

- 24) (i) Iwan menambahkan, bencana yang terjadi di awal tahun 2014 ini lebih parah dibanding dari periode yang sama tahun lalu. (ii) Namun jumlah warga yang diungsikan belum terlalu banyak. (iii) “Sampai Selasa siang hanya ada 11 warga di Trimulyo, Kecamatan Genuk yang masih bertahan di penampungan sementara. Tapi ungsian secara massif belum ada,” katanya.

Tuturan (25-i) dan (25-ii) mengandung relasi koherensi kontradiktoris. Artinya, penutur, dalam hal ini adalah Iwan, berasumsi bahwa kalau banjir tahun ini lebih parah daripada tahun kemarin, mestinya jumlah warga yang diungsikan lebih banyak. Kenyataannya, jumlah warga yang diungsikan belum terlalu banyak. Tuturan ini dapat diinterpretasi mengandung makna implisit tertentu, misalnya: (a) ‘Warga sudah siap mengantisipasi datangnya banjir; (b) ‘Pemerintah telah menangani banjir dengan baik’; (c) ‘Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang memandang banjir tahun 2014 belum membahayakan jiwa’; (d) ‘Warga enggan mengungsi karena apabila ditinggal mengungsi barang-barangnya akan hilang’; dan masih banyak lagi implikatur yang mungkin disampaikan. Namun, untuk menentukan implikatur mana yang paling mendekati ketepatan, kita harus mengaitkan tuturan tersebut dengan konteks sosial yang relevan. Seperti kita ketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang adalah institusi yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan tugas-tugasnya, termasuk dalam menangani bencana. Oleh karena itu, apa yang dilaporkan oleh badan tersebut setiap datang bencana adalah langkah-langkah konkret yang telah dilakukan. Jika ia membandingkan tingkat keparahan bencana banjir tahun 2014 dengan jumlah pengungsi yang masih kecil, ada kemungkinan makna implikatur yang paling tepat adalah (c). Pengungkapan secara implisit dianggap paling efektif karena pengungkapan secara eksplisit kemungkinan akan menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan. Makna implisit ini menghasilkan makna konsekuensi lanjutan bahwa ‘Warga baru akan diungsikan apabila banjir membahayakan kondisi jiwa mereka’.

Contoh tuturan lain yang mengandung implikatur adalah penggunaan kata *kami* oleh Wali Kota Semarang dalam tuturannya: “Untukantisipasi sementara, *kami* membangun beberapa dapur umum di titik-titik banjir. Kami juga melakukan saluran air agar tak menghambat laju air.”. Dalam tuturan tersebut, penggunaan kata *kami*, alih-alih *saya*, mengacu ke Wali Kota dan dinas-dinas terkait. Artinya, Wali Kota hendak menunjukkan bahwa pemerintah telah bekerja sama, tidak bekerja sendiri-sendiri, dalam mengatasi banjir. Tuturan tersebut kemungkinan juga mengandung implikasi bahwa Wali Kota hendak menunjukkan bahwa sebagai pemimpin ia telah berhasil mengkoordinir dinas-dinas yang ada di bawahnya.

Implikatur juga dapat ditemukan dalam tuturan Ketua DPRD Kota Semarang sebagai berikut.

- 25) “Pemkot berkewajiban menata drainase kota, seperti drainase jalan dan drainase perumahan. Termasuk komitmennya pada soal wilayah konservasi, atau penambahan lahan hijau,”

Dengan memilih kata *berkewajiban*, penutur secara implisit hendak menunjukkan relasi kuasa antara pihak legislatif dan eksekutif. Dalam tuturan tersebut, tersirat bahwa pihak legislatif memiliki kuasa untuk mengomentari apa yang telah, belum, dan seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Sementara itu, apa yang dilekatkan pada pemerintah adalah kewajiban, bukan hak atau kewenangan. Makna yang berbeda akan dihasilkan apabila penutur mengganti kata *berkewajiban* dengan *berhak* atau *berwenang*. Namun, wacana itu tidak dilakukan.

Cara ketiga dalam merepresentasikan peristiwa sosial adalah melalui *grounding* atau pelataran. Dalam berkomunikasi, seorang penutur dapat menempatkan informasi tertentu sebagai informasi utama (*foregrounding*) dan informasi lain sebagai latar belakang (*backgrounding*). Informasi utama dianggap lebih penting (*prominence*) dibandingkan dengan informasi latar. Pada umumnya, dalam struktur teks media secara global, informasi utama diletakkan di bagian *headline* atau di bagian *lead* (kalimat pertama setelah headline). Dalam teks yang dianalisis dalam penelitian ini, informasi yang diletakkan dalam *headline* adalah “Semarang dan Kendal Terendam”. Artinya, *Suara Merdeka* lebih memilih dampak dari peristiwa banjir sebagai *headline* daripada peristiwa banjir itu sendiri. Pilihan informasi utama ini kemungkinan dipengaruhi oleh ciri-ciri *genre* pemberitaan, yakni pemilihan informasi yang paling menarik pembaca. *Headline* “Semarang dan Kendal Terendam” mungkin dinilai lebih memiliki nilai jual daripada “Banjir Terjadi di Semarang dan Kendal” misalnya. Banyak informasi yang ingin diketahui pembaca ketika membaca *headline* tersebut, khususnya informasi yang terkait dengan aspek ekonomi. Di dalam *lead*, dewan redaksi menempatkan informasi bahwa ‘hujan merendam sejumlah wilayah’.

Cara merepresentasikan peristiwa sosial di dalam media juga tampak dalam *voicing*, yaitu siapa yang bertutur dalam pemberitaan tersebut dan bagaimana tuturan itu direpresentasikan. Alat linguistik yang sesuai untuk menganalisis representasi semacam ini adalah bentuk tuturan langsung dan tuturan taklangsung. Dalam tuturan langsung, reporter melaporkan apa yang dituturkan oleh narasumber apa adanya dalam tanda kutip. Sementara dalam tuturan taklangsung, narasumber menjadi perantara komunikasi antara narasumber dan pembaca.

Data dalam penelitian ini memperlihatkan keragaman dalam *voicing* tersebut. Ada tiga cara dalam merepresentasikan peristiwa banjir tersebut. Yang pertama adalah penuturan secara naratif. Dalam bernarasi, reporter melaporkan keadaan dan peristiwa yang berkaitan dengan banjir secara langsung kepada pembaca. Pada umumnya, peristiwa dan keadaan yang dilaporkan adalah bagaimana banjir itu terjadi dan efek yang timbul akibat banjir tersebut. Dalam melakukan tindak naratif, reporter tidak menghadirkan kembali peristiwa dan keadaan tersebut apa adanya, tetapi mengemas peristiwa tersebut melalui sudut pandangnya. Oleh karena itu, dalam teks tersebut ditemukan pilihan kata yang merepresentasikan subjektivitas reporter. Sebagai contoh, dalam kalimat “Banjir menjadi teror bagi warga Kota Semarang, khususnya yang berada di wilayah

Semarang bawah” merupakan evaluasi reporter atas peristiwa banjir tersebut. Kata *teror* dipilih karena menurut sudut pandang reporter, banjir sudah membuat warga merasa ketakutan dan was was. Orang lain mungkin melihatnya dengan cara yang berbeda. Dalam bernarasi, reporter cenderung melakukan evaluasi negatif terhadap peristiwa banjir. Hal tersebut dibuktikan dengan pilihan kata-kata yang mengandung nilai negatif, seperti *teror*, *lumpuh*, *merenggut*, dan *macet*. Secara garis besar, reporter seolah-olah hanya melaporkan peristiwa dan kejadian yang riil. Hal ini sesuai dengan MR yang dimiliki oleh masyarakat secara umum, bahwa reporter harus lugas dalam pemberitaan. Namun, dalam kelugasannya tersebut, reporter masih dapat mengungkapkan sudut pandangnya melalui pilihan kata yang digunakan. Dalam bernarasi ini, apa yang dilakukan oleh reporter sudah sesuai dengan karakteristik *hard news*, yaitu melaporkan suatu peristiwa atau kejadian. Dia tidak beropini secara langsung.

Cara bertutur yang kedua adalah melaporkan opini narasumber dalam bentuk tuturan taklangsung. Dalam teks ini, narasumber diambil dari tiga kelompok masyarakat, yaitu masyarakat awam, pihak pemerintah, dan pihak dari komponen legislatif. Perhatikan contoh penggalan teks di bawah ini.

- 26) Harliansyah, warga RT02 RW03 Kelurahan Mangkang Wetan, Kecamatan Tugu mengatakan, dirinya terbangun pukul empat dan air sudah masuk rumahnya dengan ketinggian 15 cm. Dia pun segera mengamankan barang berharga ke lantai dua.

Teks di atas merupakan contoh bagaimana reporter menampilkan testimoni narasumber yang mewakili masyarakat awam. Cara pemberitaan ini disebut penuturan taklangsung karena pembaca hanya dapat menerima informasi mengenai apa yang dituturkan oleh narasumber melalui reporter. Pembaca tidak tahu apakah tuturan “... dirinya terbangun pukul empat dan air sudah masuk rumahnya dengan ketinggian 15 cm. Dia pun segera mengamankan barang berharga ke lantai dua.” merupakan transformasi dari tuturan asli narasumber yang berbentuk “Saya terbangun pukul empat dan air sudah masuk rumah saya dengan ketinggian 15 cm.” atau dari tuturan dalam bentuk yang lain. Seperti halnya dengan tuturan naratif, dalam melakukan tindak tutur taklangsung ini reporter memiliki ruang untuk melakukan interpretasi atas apa yang dituturkan oleh narasumber berdasarkan sudut pandang reporter.

Sudut pandang reporter dalam melakukan tindak tutur taklangsung tampak lebih jelas dalam penggalan teks berikut.

- 27) Didik Marsudi, Ketua Komisi C DPRD Kota Semarang menegaskan kasus banjir yang terulang tiap tahun menunjukkan Pemkot Semarang minim perencanaan dan lamban dalam penyikapan. (51) Untuk mengatasi banjir, seharusnya bisa menggunakan perencanaan penanganan dengan site plan drainase peninggalan Belanda, atau site plan drainase pemkot yang dibuat tahun 1993 dan tahun 1997.

Dalam melaporkan tuturan narasumber, Didik Marsudi, reporter menunjukkan sudut pandangnya melalui pilihan kata *menegaskan*. Bahwa Didik Marsudi

melakukan tindak tutur menegaskan alih-alih mengatakan atau berpendapat adalah hasil evaluasi yang dilakukan oleh reporter. Kata *menegaskan* mungkin digunakan karena narasumber dalam bertutur secara eksplisit menggunakan klausa “Saya tegaskan”. Namun, tidak tertutup kemungkinan kata *menegaskan* ini dipilih oleh reporter karena beberapa alasan. Konteks sosial yang digunakan oleh reporter untuk menginterpretasi tuturan Didik Marsudi sebagai tindak menegaskan mungkin berupa intonasi Didik Marsudi dalam bertutur, bahasa tubuh ketika bertutur. Jika alasan kedua yang mendekati kebenaran, penggunaan kata *menegaskan* tersebut secara langsung juga menghasilkan suatu makna relasi kuasa yang tidak sepadan. Tuturan yang secara garis besar berisi tuduhan tersebut ditujukan kepada pihak pemerintah. Dengan menggunakan kata *menegaskan*, reporter hendak menginformasikan bahwa pihak legislatif memiliki kuasa untuk menyatakan secara tegas ihwal tindak menuduh tersebut. Tindak serupa tidak akan dilakukan mana kala reporter melaporkan tindak tutur taklangsung dari kelompok masyarakat awam. Tindak evaluatif yang kedua tampak pada isi tegasan tersebut. Seperti penjelasan mengenai contoh 27, tindak menuduh yang dilaporkan melalui tuturan taklangsung tersebut juga dikemas berdasarkan sudut pandang reporter. Pembaca tidak mengetahui apakah tuturan tersebut murni berasal dari penutur asli, atau sudah dalam bentuk parafrase, ringkasan, atau interpretasi reporter. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa reporter memiliki keleluasaan dalam mengungkapkan cara pandangnya dalam tindaktutur taklangsung.

Cara pelaporan yang ketiga adalah melalui tindak tutur langsung. Melalui cara ini, reporter hendak menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan benar-benar murni dari narasumber. Tindak tutur langsung ini ditulis dalam tanda kutip dan diikuti oleh klausa verbal seperti *katanya*, *tandasnya*, *tegasnya*. *Katanya* digunakan untuk melaporkan tuturan masyarakat awam, pihak pemerintah, dan pihak legislatif, sedangkan *tegasnya* dan *tandasnya* digunakan untuk melaporkan tuturan pihak legislatif. Dalam tindak tutur langsung ini narasumber seolah-olah berkomunikasi langsung dengan pembaca tanpa campur tangan reporter. Namun, reporter tetap dapat merepresentasikan sudut pandangnya melalui seleksi tuturan narasumber yang hendak dilaporkan. Pilihan bagian tuturan mana yang akan disampaikan dan tuturan mana yang tidak dilaporkan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial. Pilihan ini didasari antara lain oleh semangat untuk melaporkan berita secara kritis tetapi dengan cara tenang dan tidak meledak-ledak (Perwirawati 2012). Seperti diketahui bahwa informasi dari pihak pemerintah yang dipilih adalah informasi mengenai apa yang dilakukan pihak pemerintah dalam menangani banjir. Sementara itu, informasi yang pilih dari pihak legislatif adalah informasi mengenai kritik terhadap kinerja pemerintah untuk mencegah banjir.

Penjelasan terakhir mengenai cara merepresentasikan berita adalah melalui pilihan informasi apa yang dijadikan tema dan informasi apa yang dijadikan rema. Seperti diketahui, tema adalah apa yang akan diungkapkan oleh sebuah klausa dan rema adalah apa yang akan dikatakan mengenai tema tersebut. Tema sering diasumsikan dengan informasi yang terberikan (*given information*) sedangkan rema diasumsikan dengan informasi baru (*new information*). Pengelompokan

tema rema dalam data ini disesuaikan dengan siapa penutur dalam pemberitaan tersebut.

Dalam narasi yang dituturkan oleh reporter, tema yang dipilih sebagian besar berupa tema ideasional, yaitu apa yang hendak direpresentasikan oleh penutur. Tema ideasional dalam narasi tersebut antara lain adalah *hujan dengan intensitas tinggi, banjir, luapan sungai, air yang meluap, ketinggian air, beberapa kawasan, beberapa wilayah, ribuan rumah, arus lalu lintas, dan antrean kendaraan*. Dari data tersebut dapat diinterpretasi bahwa tema pemberitaan dalam narasi tersebut adalah peristiwa hujan dan banjir, pihak yang secara langsung menjadi korban banjir, dan akibat taklangsung dari banjir tersebut. Sementara itu, bagian informasi yang diletakkan dalam rema adalah *mengguyur kota Semarang, merendam sejumlah wilayah, menjadi teror bagi warga, mengakibatkan sejumlah wilayah lumpuh, merenggut korban jiwa, terendam banjir, merupakan wilayah paling parah, tidak bisa dilewati kendaraan, dan terjadi di ruas jalan*. Rema atau informasi baru dari tema banjir dan hujan adalah *merendam, meneror, dan melumpuhkan wilayah*. Dari pola ini, dapat dimaknai bahwa hujan dan banjir diasumsikan merupakan informasi yang telah dimiliki oleh pembaca. Reporter memberi informasi baru tentang apa yang terjadi sehubungan dengan banjir tersebut. Salah satu rema dari tema banjir adalah mengakibatkan Jalan Raya Mangkang terendam banjir. Informasi baru ini selanjutnya dijadikan tema untuk melaporkan informasi baru mengenai kemacetan arus lalu lintas. Hubungan tema rema dalam narasi reporter inilah yang menjadi inti dari *hard news* pemberitaan banjir ini. Struktur tema rema yang serupa juga diperoleh dari tuturan narasumber dari masyarakat awam.

Sebaliknya, tema dari tuturan narasumber dari pihak pemerintah dan legislatif memiliki pola yang berbeda. Tema yang dituturkan oleh pihak pemerintah secara garis besar adalah dampak hujan, jika dampak hujan semakin meluas, status darurat bencana, bencana, ungsian secara massif, status siaga bencana, dan untukantisipasi sementara. Sementara itu, rema dari tema-tema tersebut antara lain adalah mengakibatkan longsor, merenggut dua korban jiwa, tak menutup kemungkinan akan diberlakukan status darurat bencana, akan diperpanjang, membangun dapur umum, dan melakukan pembersihan saluran air. Cara menempatkan informasi dalam pola tema rema seperti di atas menunjukkan bahwa pihak pemerintah menempatkan informasi mengenai dampak hujan sebagai informasi lama yang telah diketahui oleh pembaca. Artinya, pembaca digiring untuk berasumsi bahwa kalau terjadi hujan dan banjir pasti akan menimbulkan dampak tertentu. Pihak pemerintah lebih memilih informasi tentang penetapan status darurat bencana sebagai tindakan yang mereka lakukan berkaitan dengan dampak bencana tersebut sebagai informasi baru. Informasi baru lainnya adalah perihal apa yang dilakukan terhadap pengungsian dan perihal tindakan sementara dalam menangani banjir. Cara pemerintah berwacana ini mengandung interpretasi pemerintah hendak menginformasikan bahwa pihaknya telah melakukan tindakan yang tepat dalam peristiwa ini.

Sementara itu, pihak legislatif lebih memilih informasi mengenai konsep dalam mengatasi banjir sebagai tema. Pola tema rema yang ditemukan dalam wacana pihak legislatif dapat disimak dalam contoh berikut.

- | | |
|---|---|
| 28) Kasus banjir yang berulang tiap tahun (T) | menunjukkan Pemkot Semarang minim perencanaan dan lamban dalam penyikapan (R) |
| 29) Untuk mengatasi banjir (T) | seharusnya bisa menggunakan perencanaan.... (R) |
| 30) Pertanyaannya (T) | kenapa itu tidak digunakan.... (R) |
| 31) Padahal, konsep itu (T) | sangat baik untuk penanganannya.... (R) |
| 32) Dalam penanganan banjir, (T) | juga harus terjalin kerja sama. (R) |
| 33) Program yang direncanakan ... (T) | harus sinkron, (R) |
| 34) Selama ini sinkronisasi program itu (T) | masih lemah (R) |
| 35) Padahal keduanya (T) | memiliki peran besar. (R) |
| 36) Pelanggaran tata ruang (T) | memiliki pengaruh besar dalam kasus bencana. (R) |
| 37) Hilangnya daerah hijau, (T) | menjadi penyebab memburuknya bencana banjir. (R) |
| 38) Pemkot saat ini (T) | berkewajiban menata... (R) |

Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa pihak legislatif menempatkan banjir sebagai tema hanya satu kali, yaitu dalam contoh (29). Selebihnya, mereka lebih memilih tema yang berupa informasi tentang upaya, program, dan konsep untuk menangani banjir dan kesalahan pihak lain, yang dalam hal ini adalah Pemkot dan pihak yang melanggar tata ruang dan daerah hijau. Penempatan dua jenis tema tersebut mengimplikasikan suatu asumsi yang dibangun oleh pihak legislatif bahwa upaya penanganan banjir dan pelanggaran aturan yang menyebabkan banjir menjadi informasi yang lazim diketahui oleh publik. Melalui dua tema tersebut, pihak legislatif bermaksud memberi informasi baru bahwa: (i) upaya Pemkot dalam menangani banjir masih kurang ditinjau dari berbagai aspek, seperti kurang penanganan, lamban, kurang kerja sama, dan kurang sinkron. Ini adalah upaya pihak legislatif dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas kinerja pemerintah. Selain itu, pihak legislatif juga memberi informasi baru ihwal penyebab memburuknya bencana banjir. Namun, informasi itu lebih tepat dipandang sebagai peringatan kepada pihak pemerintah, karena sejatinya pemerintah dan masyarakat pada umumnya telah memiliki informasi tersebut. Oleh karena itu, hubungan antara tema dan rema pada contoh (37) dan (38) lebih tepat apabila dimaknai sebagai tindak tutur memperingatkan (*warning*) secara taklangsung.

Struktur informasi secara makro dan struktur tema rema dalam teks ini merepresentasikan suatu kombinasi dari genre laporan yang menjadi inti dari hardnews dan genre argumentatif. Masing-masing menempatkan informasi yang berbeda dalam tema dan rema meskipun masih erat kaitannya dengan fenomena banjir.

PENGARUH STRUKTUR SOSIAL DALAM MEREPRESENTASIKAN PERISTIWA BANJIR DI SEMARANG DAN KENDAL

Di dalam bagian kerangka teoretis telah dijelaskan bahwa suatu praksis wacana tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan praksis wacana lain dalam suatu sistem sosial. Hal ini juga berlaku dalam praksis wacana yang dilakukan oleh awak media *Suara Merdeka* dalam menyampaikan berita. Reporter sebagai pencari sumber berita dan dewan redaksi yang mengolah berita adalah bagian dari sebuah institusi media. Dalam posisi ini, kedua penghasil teks itu harus tunduk pada regulasi yang ditentukan oleh institusi yang lebih berkuasa tersebut. Salah satu regulasi yang senantiasa harus dipatuhi adalah kebijakan dalam pemberitaan yang harus disampaikan dengan cara yang tenang, datar, dan tidak bombastis. Di sisi lain, *Suara Merdeka* juga harus bersifat kritis khususnya terhadap kebijakan sosial. Namun, kritik ini pun harus disampaikan dengan tenang dengan mengedepankan keserasian. Nilai-nilai tersebut tampaknya tertanam begitu kuat dalam minda awak media, sehingga berita yang dihasilkan mencerminkan aplikasi dari kebijakan - kebijakan tersebut. Dalam teks “Semarang dan Kendal Terendam Banjir”, peristiwa sosial yang direpresentasikan tampak bersifat faktual dengan disertai data-data konkret tentang wilayah yang terendam banjir, tingkat keparahan banjir, dan diperkuat dengan testimoni dari masyarakat yang secara langsung mengalami peristiwa banjir tersebut.

Namun, tampaknya juga ada struktur sosial lain yang mempengaruhi praksis wacana tersebut, yakni suatu institusi yang senantiasa menanamkan pemahaman bahwa banjir adalah peristiwa alam yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, awak media bersama masyarakat pada umumnya cenderung memposisikan banjir sebagai pelaku peristiwa, alih-alih akibat dari suatu peristiwa lain. Pilihan kata dalam merepresentasikan banjir menunjukkan bahwa awak media sebagai bagian dari masyarakat pada umumnya cenderung menyalahkan banjir. Inilah cara media mengemas peristiwa banjir menjadi berita.

Di sisi lain, tampak bahwa struktur ekonomi memiliki pengaruh kuat dalam kehidupan masyarakat. Setiap peristiwa dan kejadian senantiasa dikaitkan dengan aspek ekonomi. Dalam teks ‘Semarang dan Kendal Terendam Banjir’ terbukti bahwa baik narasi redaksi maupun testimoni masyarakat melihat peristiwa tersebut lebih pada efek ekonomis yang ditimbulkan daripada efek-efek sosial yang lain.

Nilai kebijakan lain yang tampak teraplikasikan dalam pemberitaan banjir ini adalah pemberitaan peristiwa utama harus diperkuat dengan sisi lain sebuah berita. Dewan redaksi memaknai dan menjabarkan kebijakan ini dengan memilih siapa narasumber yang akan dipilih dan pendapat seperti apa yang akan mereka beritakan. Selain masyarakat awam, pencari berita *Suara Merdeka* juga memilih narasumber dari dua institusi negara yang setakat ini lebih sering bersilang pendapat, yaitu institusi dari badan legislatif dan eksekutif. Pilihan atas dua narasumber ini menjadi bumbu penyedap pemberitaan mengingat pembaca *Suara Merdeka* sebagian besar memiliki pengetahuan politik yang memadai dan memiliki ketertarikan atas berita perkembangan politik di Indonesia. Konteks sosial yang berupa pengklasifikasian masyarakat atas masyarakat awam, pemerintah,

dan pengawas pemerintah serta relasi kuasa yang terbangun atas ketiga kelompok masyarakat tersebut juga terepresentasikan dalam pemberitaan tersebut. Masyarakat awam diyakini tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, sebagai narasumber, kelompok ini hanya dimintai keterangan seputar apa yang mereka saksikan pada saat banjir itu terjadi. Artinya, informasi yang disampaikan dari narasumber kelompok ini mengacu ke peristiwa yang paling kongkret. Sebaliknya, informasi yang dipilih dari kelompok pemerintah dan kelompok legislatif adalah informasi yang lebih abstrak, yakni informasi tentang suatu kebijakan. Relasi kuasa tampak di sini karena hanya pihak yang berkuasa yang memiliki hak untuk mengeluarkan kebijakan. Itulah sebabnya, pilihan kata yang digunakan untuk melaporkan peristiwa verbal berbeda antara peristiwa verbal yang dilakukan oleh masyarakat awam dan yang dilakukan oleh pihak legislatif dan eksekutif (lihat penjelasan sebelumnya).

Praksis sosial yang tengah berlangsung dalam level institusi negara juga mempengaruhi cara media *Suara Merdeka* mengemas berita banjir tersebut. Seperti kita ketahui, sejak runtuhnya orde baru, fungsi dan peran badan legislatif yang sebelumnya hanya tampak sebagai penyetuju kebijakan pemerintah mulai kembali pada fungsi sesungguhnya, yaitu sebagai pengawas kinerja pemerintah. Bahkan, pada orde reformasi ini, badan legislatif semakin kencang dalam menjalankan fungsi kontrolnya, sehingga seolah-olah badan eksekutif dan badan legislatif merupakan dua kubu yang saling berseberangan. Masyarakat umum memahami dengan baik kondisi ini, termasuk awak media. Kondisi ini tercermin dalam memilih informasi apa yang ingin disampaikan dalam pemberitaan tersebut. Pembaca memang tidak mengetahui informasi apa saja yang ditanyakan oleh pencari berita ketika mewawancarai kedua lembaga tersebut. Namun, masyarakat tahu bahwa dari hasil wawancara, bagian informasi apa yang akan disampaikan dan bagian informasi apa yang tidak diberitakan merupakan hak dewan redaksi. Oleh karena itu, kita dapat menginterpretasikan bahwa pilihan untuk memberitakan kritik pihak legislatif terhadap kinerja pemerintah dalam mencegah dan mengatasi banjir kemungkinan sengaja dipilih oleh redaksi untuk menunjukkan kondisi yang berseberangan tersebut.

SIMPULAN

Analisis linguistik dan sosial atas teks pemberitaan “Semarang dan Kendal Terendam Banjir” yang diterbitkan oleh *Suara Merdeka* pada tanggal 5 Februari 2014 menunjukkan bahwa fakta yang diberitakan dalam sebuah media bukanlah fakta objektif, melainkan fakta yang dikonstruksi oleh individu atau institusi. Dari hasil analisis tersebut tampak bahwa informasi yang disampaikan oleh media *Suara Merdeka* tersebut adalah hasil proses representasi atas berbagai peristiwa dari berbagai sudut pandang. Pihak redaksi menggunakan sudut pandangnya dalam membentuk narasi utama pemberitaan, dalam memilih narasumber, dalam mewawancarai narasumber, dan dalam menyeleksi informasi dari narasumber yang akan disampaikan. Dengan menggunakan ancangan analisis wacana kritis, dapat ditemukan relasi antara praksis sosial yang tengah terjadi di dalam struktur sosial dengan praksis wacana yang dilakukan oleh pihak media *Suara Merdeka*. Dengan demikian kita dapat memprediksi bahwa peristiwa yang

sama kemungkinan direpresentasikan dengan cara yang berbeda oleh media lain karena media lain tersebut memiliki cara yang berbeda dalam memaknai peristiwa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Austin, J.L. 1962. *How to Do Things with Words*. Oxford: Oxford University Press.
- Fairclough, N. 1995. *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. London: Longman.
- . 2001. *Language and Power* (2nd edn.). Harlow: Pearson Education Limited.
- . 2003. *Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research*. London: Routledge.
- Halliday, M. 1994. *An Introduction to Functional Grammar*, edisi ke dua. London: Edward Arnold.
- Levinson, S. 1993. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Martin, J.R. dan David Rose. 2003. *Working with Discourse*. London: Continuum
- Mills, S. 1995. *Feminist Stylistics*. London: Routledge
- Perwirawati, E. 2012. "Gatekeeping Pemberitaan Pemilihan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah Periode 2011-2016 di Surat kabar *Suara Merdeka*". Diakses 23 April 2014. <http://eprints.undip.ac.id/38472/1/Cover.pdf>
- Van Leeuwen, T. 1995. "Representing Social Action". dalam *Discourse and Society* 6(1): 81-106